

## Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Wilayah Kabupaten/Kota Karesidenan Surakarta Tahun 2014-2021

Whias Nur Alfaisih, Wikan Budi Utami, M Hasan Ma'ruf

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Intitute Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia

### Alamat Email:

wias.waru@gmail.com<sup>1</sup>, budiuatamiwikan@gmail.com<sup>2</sup>, hasan.stie.aas@gmail.com<sup>3</sup>

### Sitasi Artikel:

Alfaisih, W. N., Utami, W. B., & Ma'ruf, M. H., (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Wilayah Kabupaten/Kota Karesidenan Surakarta Tahun 2014-2021. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 2(2), 317-326.

**Abstract:** *This study analyses the factors that influence local tax revenue in the Regency / City of Surakarta Residency in 2014-2021 using the variables of population, local revenue and gross regional domestic product (GRDP). The purpose of this study is to determine how the influence of population, local revenue and GRDP on local tax revenue. The sample in this study amounted to 56 data taken using saturated sample technique. The data used in this study are secondary data (time series) from 2014-2021 sourced from the Surakarta Karesidenan Central Bureau of Statistics. Data collection techniques using literature studies and documentation studies. This study uses data analysis methods in the form of normality tests, heteroscedasticity tests, multicollinearity tests and autocorrelation tests. While hypothesis testing uses multiple linear regression analysis, F test, t test, and coefficient of determination. The results showed that population has a negative and significant effect on local tax revenue, while local revenue and GRDP have a positive and significant effect on local tax revenue in the regency / city of Surakarta Residency.*

**Keywords:** *Population, Local Revenue, GRDP, Local Taxes.*

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten/Kota Karesidenan Surakarta tahun 2014-2021 dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, pendapatan asli daerah dan produk domestik regional bruto (PDRB). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah penduduk, pendapatan asli daerah dan PDRB terhadap penerimaan pajak daerah. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 56 data yang diambil dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*time series*) dari tahun 2014 - 2016 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Karesidenan Surakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas dan uji autokorelasi. Sedangkan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan pendapatan asli daerah dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten/kota Karesidenan Surakarta.

**Kata Kunci:** *Jumlah Penduduk, PAD, PDRB, Penerimaan Pajak Daerah.*

## 1. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014, "Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pemerintah daerah diberikan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat untuk memaksimalkan potensi sumber dana yang dimilikinya dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

Otonomi daerah dilakukan karena adanya pembangunan daerah yang tidak merata sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta pengembangan pembangunan daerah menjadi terhambat. Dengan adanya penerapan UU tentang otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih aktif dalam mengelola sumber pendapatan daerah dan meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat sehingga terciptanya kemandirian daerah. Kemampuan daerah dalam melakukan pembangunan akan semakin meningkat jika pendapatan suatu daerah semakin tinggi (Artha, 2016).

Proses pembangunan daerah diperlukannya suatu anggaran yang diperoleh melalui pemungutan pajak daerah. Pajak daerah ialah sumber pendapatan daerah yang berperan penting dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak daerah juga berperan dalam mendistribusikan dan mengalokasikan kegiatan perekonomian di dalam suatu daerah. Oleh sebab itu, penting untuk menetapkan target perolehan pajak setiap tahunnya dengan tujuan untuk memaksimalkan realisasi penerimaan pajak daerah agar kontribusinya terhadap Pendapatan asli daerah tetap berjalan secara optimal (Sari, 2022).

Karesidenan Surakarta merupakan kabupaten/kota yang terletak di Provinsi Jawa

Tengah dengan perekonomian baik. Penerimaan pajak daerah di kabupaten/kota Karesidenan Surakarta cukup besar, namun terjadi penurunan penerimaan pajak daerah di salah satu kabupaten tersebut, di mana sistem pemungutan pajak daerah berbeda dengan pajak pusat. Pemungutan pajak daerah pada kabupaten/kota Karesidenan Surakarta ditarik langsung oleh pegawai pemerintahan sehingga wajib pajak dapat membayar langsung pajaknya pada kantor yang menangani pendapatan daerah, dalam hal ini dibebankan pada DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah).

Di wilayah Kabupaten/kota Karesidenan Surakarta penerimaan pajak daerah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari pemerintah di setiap kabupaten/kota dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah. Namun, besarnya penerimaan pajak daerah di setiap kabupaten/kota dapat berbeda-beda, karena adanya perbedaan potensi yang dimiliki untuk mendukung penerimaan pendapatan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya jumlah penduduk, Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto. Faktor-faktor ini digunakan sebagai proyeksi penerimaan pajak daerah dan selalu berfluktuasi setiap tahunnya.

Jumlah penduduk dapat berpengaruh dalam proses pembangunan daerah. Pembangunan daerah akan terlaksana secara lebih cepat jika memiliki jumlah penduduk yang besar, namun jika jumlah penduduknya sedikit maka pembangunan daerah pun akan lebih lambat dalam pelaksanaannya (Sania, 2018). Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Artha, 2016) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara jumlah penduduk dan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jember. Selain itu, terdapat *research gap* dari penelitian Linda Pratiwi (2021) yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak



berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Pendapatan Asli Daerah berasal dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya yang sah. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin kecil jika penerimaan PAD semakin besar. Hal ini mengindikasikan kapasitas daerah yang lebih besar dalam membiayai pembangunan daerah (Saputra, 2018). Hasil penelitian dari Amelia Dewi Astuti (2021), didapati bahwa PAD berpengaruh bersama-sama terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo.

PDRB merupakan salah satu indikator untuk melihat bagaimana pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Dengan mempertimbangkan situasi ekonomi yang selalu tumbuh dan berkembang akan menyebabkan pendapatan masyarakat di daerah tersebut mengalami peningkatan (Sania, 2018). Semakin tinggi tingkat PDRB suatu daerah maka akan berdampak positif terhadap peningkatan produksi barang dan jasa sehingga penerimaan pajak daerah juga akan meningkat. Hasil penelitian oleh (Sari, 2022), menyatakan bahwa PDRB berpengaruh signifikan, baik secara simultan maupun secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah pada Kabupaten Deli Serdang.

## 2. Tinjauan Teoritis

### 2.1 Pajak Daerah

Menurut UU No 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-jenis pajak daerah di kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB

perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

### 2.2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pengambilan kebijakan di suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jumlah penduduk, persebaran dan pertumbuhan serta kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama kurang lebih 6 bulan. Agustina Bidarti (2020) mendefinisikan pertumbuhan penduduk sebagai pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu. Sumber data kependudukan terdiri dari sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk.

### 2.3. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk hasil pengelolaan BUMD, dan lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, komisi dan potongan, serta keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

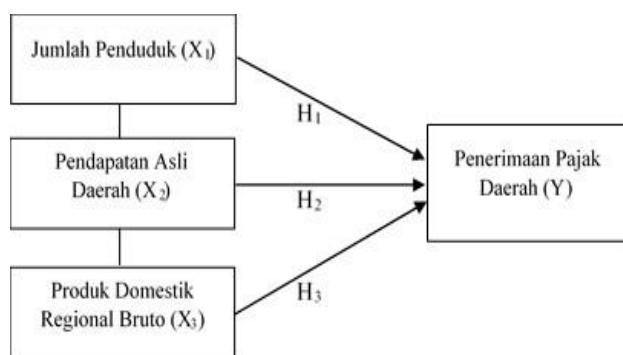
### 2.4. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh suatu unit usaha dalam suatu wilayah domestik atau merupakan jumlah seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi di suatu wilayah. PDRB dapat dibagi menjadi 2 kategori, PDRB atas dasar harga berlaku, digunakan untuk mengukur nilai tambah barang/jasa untuk menganalisis sumber daya ekonomi dan struktur wilayah. PDRB ini mengacu pada harga yang berlaku pada tahun



berjalan. PDRB atas dasar harga konstan, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dengan menggunakan harga barang dan jasa yang berlaku pada tahun tertentu. PDRB atas dasar harga konstan membantu melacak perubahan nilai tambah ekonomi dari waktu ke waktu.

## 2.5. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Modifikasi dari berbagai sumber 2023

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H1: Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
- H2: PAD berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
- H3: PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

## 3. Metode Penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari sekelompok orang, benda atau sesuatu yang dianggap relevan dengan penelitian (Syaiful Bahri, 2018). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh penerimaan pajak daerah di kabupaten/kota Karesidenan Surakarta yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali pada tahun 2014 -2019. Menurut Sugiyono (2019), sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini digunakan teknik sampel

jenuh, dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Pemilihan teknik sampel jenuh dilakukan karena jumlah populasi yang relatif kecil. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 56 data.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan studi dokumentasi. Data penelitian ini diambil dari website Badan Pusat Statistik (BPS) masing-masing kabupaten/kota Karesidenan Surakarta tahun 2014-2021. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jumlah penduduk, Pendapatan Asli Daerah dan PDRB.

Metode analisis data yang digunakan adalah:

### a. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif adalah teknik analisis data untuk mendeskripsikan karakteristik data yang telah terkumpul, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Anwar Sanusi, 2011). Statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari variabel-variabel penelitian yang digunakan.

### b. Uji Asumsi Klasik

#### 1) Uji Normalitas Data

Danang Sunyoto (2016), uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen dalam persamaan regresi memiliki distribusi yang mendekati normal. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan grafik histogram, grafik Normal Probability Plot dan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S).

#### 2) Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot antara SRESID (standard residual) dan ZPRED (standard predictor).

- 3) Uji Multikolinieritas  
Ghozali (2018), uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui korelasi antar variabel independen. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factors) dan tolerance. Jika VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas di dalam model regresi.
- 4) Uji Autokorelasi  
Ghozali (2018), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson. Jika  $DU < DW < 4 - DU$ , maka hipotesis nol diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi.

c. Pengujian Hipotesis

- 1) Analisis Regresi Linier Berganda  
Danang Sunyoto (2016), analisis regresi linier berganda ialah teknik statistik untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Adapun persamaan dari analisis regresi linier berganda adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Penerimaan Pajak Daerah
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1 \dots \beta_3$  = Koefisien Variabel
- $X_1$  = Jumlah penduduk
- $X_2$  = Pendapatan Asli Daerah
- $X_3$  = Produk Domestik Regional Bruto

- 2) Uji F  
Ghozali (2016), uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan model regresi apakah variabel independen secara

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi < 0,05 atau nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka uji model regresi layak digunakan dalam penelitian ini.

- 3) Uji t  
Ghozali (2018), uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi < 0,05 dan nilai t hitung > nilai t tabel atau -t hitung < -t tabel, maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara parsial.
- 4) Koefisien Determinasi  
Ghozali (2016), koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel independen yang dapat ditunjukkan melalui nilai Adjusted R Square. Kisaran nilai Adjusted R Square adalah 0 dan 1. Apabila nilai Adjusted R Square mendekati 1, maka mengindikasikan variabel independen mampu memberikan sebagian besar informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai Adjusted R Square mendekati 0, maka mengindikasikan kemampuan variabel-variabel independen dalam memprediksi variabel dependen amat terbatas.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Penduduk	56	510.077	1.267.272	902.401,27	188.845,111
PAD	56	177.922.415	557.448.878	351.972.333,018	105.408.439,815
PDRB	56	16.109.707	36.211.248	24.277.106,268	4.613.209,881
Penerimaan Pajak Daerah	56	29.524.863	360.053.930	139.250.424,642	83.520.153,139
Valid N (listwise)	56				

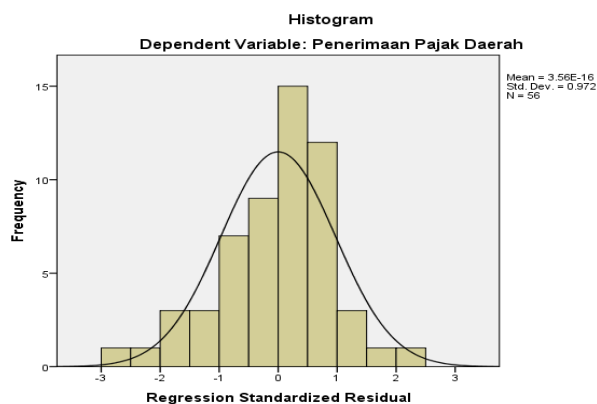
Sumber: Output SPSS 23



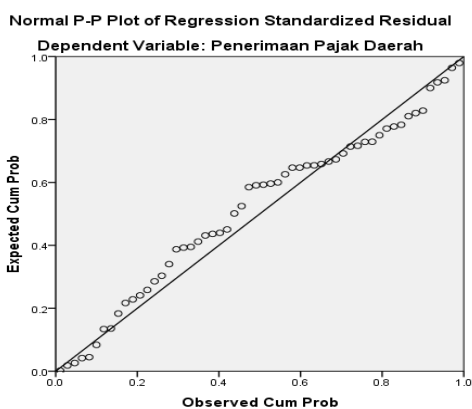


Jumlah penduduk memiliki 56 data (N), dengan nilai minimum 510.077 dan nilai maksimum 1.267.272. Nilai rata-rata (mean) sebesar 902.401,27 dengan standar deviasi sebesar 188.845,111. PAD memiliki jumlah data (N) sebanyak 56 data, dengan nilai minimum sebesar 177.922.415 dan nilai maksimum sebesar 557.448.878. Nilai rata-rata (mean) sebesar 351.972.333,018 dengan standar deviasi sebesar 105.408.439,815.

PDRB memiliki jumlah data (N) sebanyak 56 data, dengan nilai minimum sebesar 16.109.707 dan nilai maksimum sebesar 36.211.248. Nilai rata-rata (mean) dari PDRB adalah sebesar 24.277.106,2678 dengan standar deviasi sebesar 4.613.209,881. Penerimaan Pajak Daerah memiliki jumlah data (N) sebanyak 56 data, dengan nilai minimum sebesar 29.524.863 dan nilai maksimum sebesar 360.053.930. Nilai rata-rata (mean) PAD sebesar 139.250.424,642 dengan standar deviasi sebesar 83.520.153,139.



**Gambar 2. Histogram**  
Sumber: Output SPSS 23

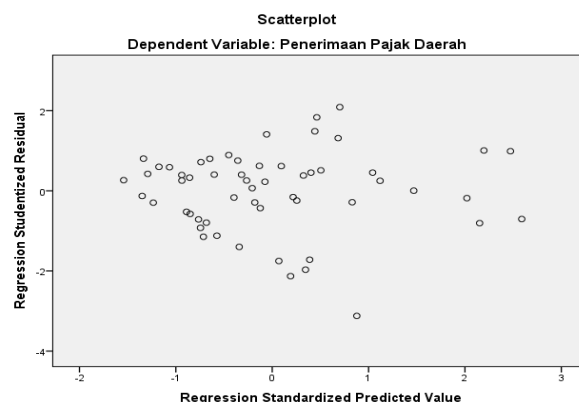


**Gambar 3. Normal Probability Plot**

**Sumber: Output SPSS 23**

Dari gambar histogram terlihat bahwa kenaikan/penurunan data mendekati garis lengkung dan tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan sehingga model regresi berdistribusi normal. Dalam grafik normal probability-plot, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada model regresi berdistribusi normal.

Melalui uji Kolmogorov Smirnov diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 dan lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.



**Gambar 4. Scatterplot**  
Sumber: Output SPSS 23

Dari gambar terlihat bahwa titik-titik (plot) tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas, maka data model regresi tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 2. Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Jumlah Penduduk	0,717	1,394
PAD	0,430	2,326
PDRB	0,406	2,466

**Sumber: Output SPSS 23**

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa variabel independen tidak terjadi multikolinieritas. Hal ini dapat dilihat pada nilai VIF variabel jumlah penduduk sebesar (1,394 < 10) dan nilai tolerance sebesar (0,717 > 0,1). Nilai VIF



variabel PAD sebesar ( $2,326 < 10$ ) dan nilai tolerance sebesar ( $0,430 > 0,1$ ). Nilai VIF variabel PDRB adalah ( $2,466 < 10$ ) dan nilai tolerance adalah ( $0,406 > 0,1$ ).

**Tabel 3. Uji Autokorelasi**

Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	33.903.182,48740	2,025

Sumber: Output SPSS 23

Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,025. Nilai Durbin-Watson (DW) berada diantara  $DU < DW < 4 - DU$  yaitu  $1,6830 < 2,025 < 2,317$ , maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi autokorelasi.

**Tabel 4. Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	-45.346,761	46.929,653	
Jumlah Penduduk	-0,120	0,029	-0,271
PAD	0,284	0,066	0,358
PDRB	0,008	0,002	0,439

Sumber: Output SPSS 23

$$Y = -45,346,761 - 0,120X_1 + 0,284X_2 + 0,008X_3 \dots (2)$$

Interpretasi dari analisis regresi linier berganda dijelaskan sebagai berikut, nilai konstanta sebesar -45.346,761 artinya jika jumlah penduduk ( $X_1$ ), PAD ( $X_2$ ), dan PDRB ( $X_3$ ) sama dengan nol, maka besarnya penerimaan pajak daerah sebesar -45.346,761.

Jumlah penduduk ( $X_1$ ) memiliki koefisien sebesar -0,120 dan bertanda negatif, yang berarti jika jumlah penduduk bertambah 1 satuan, maka penerimaan pajak daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,120. Sebaliknya jika jumlah penduduk menurun 1 satuan maka penerimaan pajak daerah akan meningkat sebesar 0,120.

PAD ( $X_2$ ) bernilai positif dan memiliki koefisien sebesar 0,284, artinya jika variabel pendapatan asli daerah mengalami kenaikan 1 satuan maka penerimaan pajak daerah juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,284 dan sebaliknya.

PDRB ( $X_3$ ) memiliki koefisien sebesar 0,008 dan

bertanda positif, artinya jika variabel PDRB mengalami kenaikan 1 satuan, maka penerimaan pajak daerah juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,008 dan sebaliknya.

**Tabel 5. Uji F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Reg	323.888.738	3	107.962.912.740	93,928	0,000 <sup>b</sup>

Sumber: Output SPSS 23

Dengan tingkat signifikansi 0,05, jumlah data 56 ( $n$ ) dan jumlah variabel independen 3 ( $k=3$ ), maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,78. Berdasarkan hasil uji F memiliki Fhitung sebesar ( $93,927 > Ftabel (2,78)$ ) dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka pengujian model regresi dengan uji F layak digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 6. Uji t**

Model	t	Sig.
(Constant)	-0,966	0,338
Jumlah Penduduk	-4,195	0,000
PAD	4,293	0,000
PDRB	5,105	0,000

Sumber: Output SPSS 23

Dengan tingkat signifikansi 0,05, jumlah data 56 ( $n$ ) dan jumlah variabel independen 3 ( $k=3$ ), maka diperoleh nilai t tabel sebesar 2,00665 atau 2,007 atau -2,007 (Pengujian menggunakan two tailed).

Nilai t hitung jumlah penduduk sebesar -4,195 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar -2,007. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Nilai t hitung Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,293 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,007. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_2$ ) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak



daerah.

Nilai t hitung PDRB sebesar 5,105 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,007. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (h3) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

**Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,919 <sup>a</sup>	0,844	0,835	33.903,233

Sumber: Output SPSS 23

Hasil uji koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,835. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk, pendapatan asli daerah dan PDRB dapat menjelaskan variabel penerimaan pajak daerah di wilayah Karesidenan Surakarta sebesar 83,5%, sedangkan sisanya sebesar 16,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

#### 4.2. Pembahasan

##### a. Pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Apabila jumlah penduduk meningkat, justru akan membuat penerimaan pajak daerah menurun. Hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan struktur penduduk dan perubahan pola konsumsi. Jika peningkatan jumlah penduduk didominasi oleh kelompok yang memiliki tingkat pendapatan rendah atau tidak memiliki kewajiban pajak, maka hal ini akan menyebabkan penurunan pajak daerah. Begitu pula dengan perubahan pola konsumsi, jika penambahan jumlah penduduk tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kegiatan konsumsi, maka penerimaan pajak daerah yang

terkait dengan pajak penjualan juga akan mengalami penurunan.

Hal ini tidak sejalan dengan teori perpajakan "Ketika jumlah penduduk meningkat, maka permintaan akan barang publik juga akan meningkat, sehingga pemerintah akan berusaha mengoptimalkan untuk menyediakan barang, namun dengan timbal balik berupa pemungutan pajak yang bersifat memaksa". Peningkatan jumlah penduduk dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas pelaku ekonomi, yang akan berdampak pada perekonomian dan pajak daerah (Susanto dan Iwan, 2014).

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Denny George Lumy (2018), mengenai teori hubungan positif antara jumlah penduduk dengan penerimaan pajak daerah, yang artinya jika jumlah penduduk meningkat maka penerimaan pajak daerah juga akan meningkat.

##### b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan pajak daerah

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah, maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan kemampuan daerah yang semakin besar dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah (Saputra, 2018). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia Dewi Astuti (2021), bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo. Peningkatan PAD akan menyebabkan tanggung jawab pemerintah daerah semakin besar terhadap penerimaan pajak daerah yang diterima.

##### c. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan pajak daerah

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan,





dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Dilihat dari kondisi perekonomian yang semakin tumbuh dan berkembang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Sania, 2018). Teori lain menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat PDRB suatu daerah, maka produksi barang dan jasa juga akan meningkat. Hal ini akan berdampak pada penerimaan pajak daerah yang semakin meningkat, karena kemampuan masyarakat dalam membayar pajak yang telah ditetapkan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputra (2018) dan Sari (2022) yang menyatakan bahwa PDRB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang dan di Kota Cilegon.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar  $(0,000 < 0,05)$  dan nilai  $t$  hitung lebih besar dari nilai  $t$  tabel  $(-4,195 < -2,007)$ . Dengan demikian hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima.

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar  $(0,000 < 0,05)$  dan nilai  $t$  hitung lebih besar dari nilai  $t$  tabel  $(4,293 > 2,007)$ . Dengan demikian hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_2$ ) diterima.

PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar  $(0,000 < 0,05)$  dan nilai  $t$  hitung lebih besar dari nilai  $t$  tabel  $(5,105 > 2,007)$ . Dengan demikian hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_3$ ) diterima.

## 6. Keterbatasan Dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian hanya menggunakan data sekunder dari data publikasi BPS dan tidak berdasarkan observasi

secara langsung dan dalam penelitian ini hanya mengambil 3 variabel independen, sehingga belum dapat menjelaskan semua variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lain yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah dan dapat menambah populasi dari daerah lain sehingga hasil penelitian selanjutnya lebih representatif.

## 7. Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan seluruh rekan-rekan di ITB AAS Indonesia yang senantiasa membantu dan membimbing serta mengajarkan banyak ilmu sehingga artikel ini dapat terselesaikan.

## Daftar Pustaka

- Artha, Y. D. (2016). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember. *Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Universitas Fakultas Jember*.
- Astuti, A. dewi. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020. *Skripsi. ITB AAS Indonesia*.
- Badan Pusat Statistika 2022. *Jawa tengah dalam Angka 2022*.
- Bahri, S. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Bidarti, A. (2020). *Teori Kependudukan*. Penerbit LINDAN Bestari.
- Gatiningsih. (2017). *Kependudukan dan Ketenagakerjaan*. Fakultas Manajemen IPDN.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, D. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, D. dkk. (2017). Pengaruh Pendapatan



326 **Alfaisih, W. N., Utami, W. B., & Ma'ruf, M. H., (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Wilayah Kabupaten/Kota Karesidenan Surakarta Tahun 2014-2021.**

Asli daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada pemerintahan Kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 13.

Lumy, D. G. dkk. (2018). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak daerah pada pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 1–16.

Pratiwi, L. W. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Daerah dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten/kota Jawa Timur Tahun 2015-2019. *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.

Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan Indonesia: keuangan, pajak dan retribusi daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sania, H. dkk. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah pada kabupaten dan kota di provinsi jawa tengah. IX (2).

Sanusi, A. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Saputra, A. A. (2018). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Cilegon.

Sari, L. P. (2022). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang. *Skripsi*, 8.5.2017, 2003–2005.

Sudaryono. (2019). *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sunyoto, D. (2016). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. PT Refika Aditama Anggota Ikapi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014. *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004. *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004. *Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

